

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN
KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ENREKANG**

SKRIPSI



Oleh
RESKY ARSITA
10573 05335 15

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN
KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ENREKANG**

SKRIPSI

Oleh
RESKY ARSITA
NIM 105730533515

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan
Studi Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda, ketulusannya dari hati atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak pernah ternilai, Serta untuk orang-orang terdekatku dan untuk Almamater Biru Kebanggaanku.

MOTTO HIDUP

“ Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan solatmu sebagai penolong, Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah: 153)

“ Sekali terjun dalam perjalanan jangan pernah mundur sebelum meraihnya yakin usaha sampai. Karena sukses itu harus melewati banyak proses, bukan hanya menginginkan hasil akhir atau beres tapi harus selalu keep on progress. Meskipun kenyataannya banyak hambatan dan kamupun sering dibuat stress percayalah tidak ada jalan lain untuk meraih sukses selain melewati yang namanya proses”. (Armeliana)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang."
Nama Mahasiswa : Resky Arsita
No Stambuk/NIM : 105730533515
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019 di Ruang IQ 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

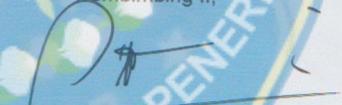
Makassar, 31 Agustus 2019

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Asriati, SE., M.Si.
NIDN: 0031126303


Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA. CSP
NIDN: 0915058804

Diketahui :

Mengetahui,
Prodi Studi Akuntansi




Dr. Ismail Badollahi, SE, M.Si. Ak. CA. CSP
NBM: 1913428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Resky Arsita, NIM 105730533515, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 145 / Tahun 1440 H / 2019 M, Tanggal 31 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Dzulhijjah 1440 H

31 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....)
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....)
2. Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC (.....)
3. Hasanuddin, SE., M.Si (.....)
4. Amran, SE., M.Ak.Ak., CA (.....)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Resky Arsita
Stambuk : 105730533515
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuatkan oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan

METERAI
TEMPEL
REBASAEF920180753
6000
RIBU KE BUAH
RESKY ARSITA

Diketahui Oleh:



Dekan,

Ismael Rosulong, SE., MM
NPM : 903078

Ketua Program Studi Akuntansi,

Dr. Ismail Badollahi, SE. M.Si, Ak. CA. CSP
NBM: 107 3428

ABSTRAK

Resky Arsita, 2019, Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar . Dibimbing oleh pembimbing I Asriati dan Pembimbing II Ismail Badollahi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan yang terdapat pada Badan Pusat Keuangan Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer berupa koesioner. Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan metode Kuantitatif. Jumlah responden sebanyak 30 orang. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan uji validitas , uji realibilitas dan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Manajemen Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.

Kata kunci: ketepatan waktu, Sistem Pengendalian Manajemen



ABSTRACT

Resky Arsita, 2019, *Effect of Management Control Systems on the Timeliness of Financial Reporting at the Enrekang Regional Government, Skripsi Faculty of Economics and Business Accounting Department, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Asriati and Supervising Advisor Ismail Badollahi.*

This study was conducted to determine the Effect of Management Control Systems on the Timeliness of Financial Reporting contained in the Regional Financial Board. The data used in this study is to use primary data in the form of questionnaires. The type of research used is quantitative method. The number of respondents was 30 people. The analysis technique in this study uses the validity test, reliability test and simple regression analysis. The results showed that the Management Control System Influences the Timeliness of Financial Reporting in Enrekang District Government.

Keywords: *timeliness, Management Control System.*



KATA PENGANTAR

Dengan segala ketulusan dan kelembutan hati, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wata'ala* atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik. Tak lupa penulis haturkan salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wassallam* beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Alhamdulillah setelah penulis melewati masa-masa pembelajaran di prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar ini, akhirnya penulis telah menyelesaikan tugas akhir di kampus ini guna untuk meraih gelar SE (Sarjana Ekonomi). Dalam proses penyelesaian studi di kampus ini, penulis banyak mendapat bantuan dari banyak pihak, sehingga penulis ingin menyampaikan ucapan banyak terima kasih yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam pelaksanaan bimbingan, pengarahan, dan dorongannya selama ini, yakni :

1. Ayahanda Sulnadi dan Ibunda Inriani yang tercinta atas seluruh cinta, kasih, sayang, perhatian, pengorbanan, kesabaran dan membesarkan, mengasuh, dan mendidik penulis selama ini. Sampai kapan pun mungkin penulis tidak akan pernah dapat membalas budi baik mereka.
2. Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM.,selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM.,selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSP.,selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Ibu Asriati ,SE.,M.Si Selaku pembimbing I dan Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSP., Selaku pembimbing II terima kasih atas bimbingan dan nasehat-nasehatnya selama dalam pemeriksaan skripsi ini.
6. Segenap Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Khususnya dosen-dosen Jurusan Akuntansi, yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama dalam proses perkuliahan
7. Seluruh keluarga besar tercinta yang turut membantu, menyemangati dan mendoakan dan penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Akuntansi khususnya kelas Akuntansi 15E (ARC) yang selama ini saling mensupport satu sama lain yang telah menjadi bagian dalam bingkai kehidupanku. Teima kasih atas segala bantuan dan semangatnya serta jalinan persahabatan selama ini.
9. Sahabat-sahabatku Irham, Hasni, Risma yang selama ini membantu menyusun sampai selesai skripsi ini, Terima kasih yang tak terhingga.
10. Buat teman-teman yang tidak sempat saya sebut namanya Terimakasih telah mendoakan dan memberikan semangat serta ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Dan tiada imbalan yang dapat diberikan oleh penulis,hanya kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* penulis menyerahkan segalanya dan semoga bantuan yang diberikan selama ini bernilai ibadah disisi-Nya. Aamiin...

Makassar, 2019

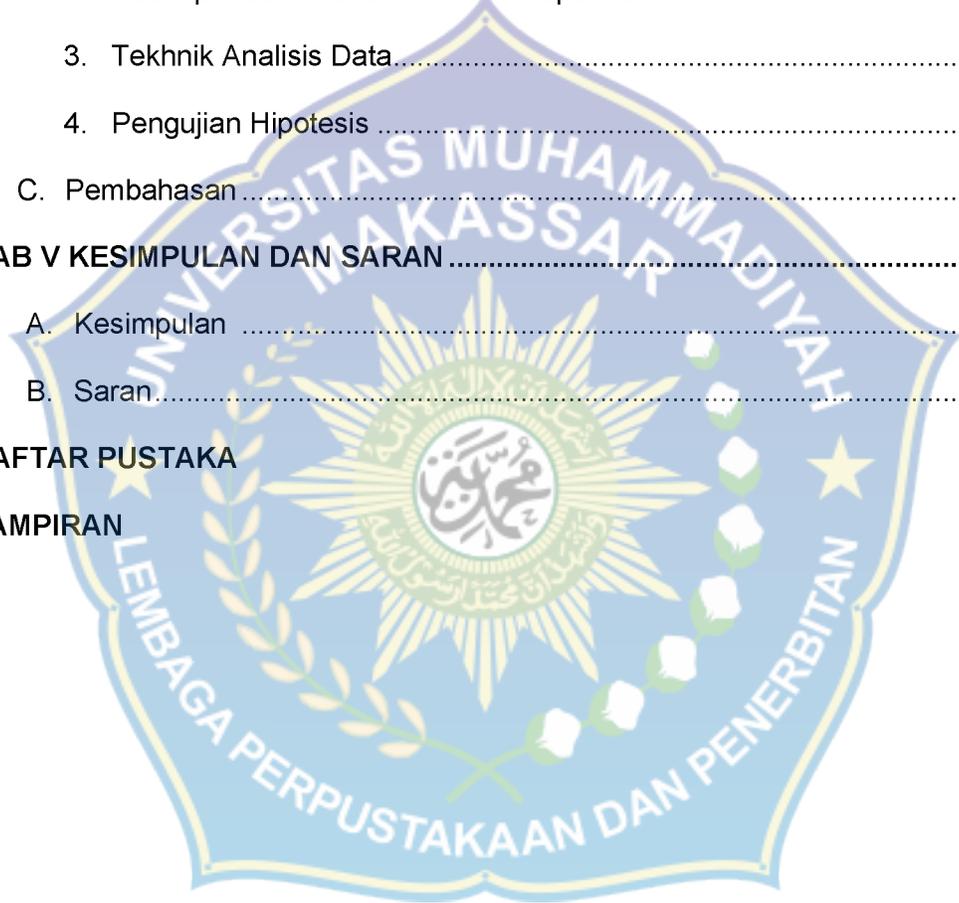
Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Landasan Teori	6
a. Teori Kontijensi.....	6
b. Teori Kepatuhan.....	6

B. Sistem Pengendalian Manajemen	7
a. Elemen Sistem Pengendalian Manajemen	8
b. Proses Pengendalian Manajemen	8
c. Dasar-dasar Sistem Pengendalian Manajemen	9
d. Tipe Pengendalian Manajemen	9
e. Karakteristik Sistem Pengendalian Manajemen	10
f. Struktur sistem Pengendalian Manajemen	10
g. Tujuan Sistem Penegndalian Manajemen	11
C. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan	14
D. Keuangan Pemerintah Daerah	15
a. Pelaporan Keuangan	15
b. Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah	15
E. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	16
F. Penelitian Terdahulu	18
G. Kerangka Konsep	23
H. Hipotesis	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	24
C. Defenisi Operasional dan Variabel Pengukuran	24
D. Populasi Dan Sampel	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisis	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	30
B. Hasil Penelitian	54
1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang	54
2. Deskriptif Data Penelitian dan Responden.....	57
3. Teknik Analisis Data.....	62
4. Pengujian Hipotesis	66
C. Pembahasan.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian.....	25
Tabel 4.1 Jmlah Data Koesioner.....	58
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden.....	59
Table 4.3 Pendidikan Responden.....	59
Tabel 4.4 Masa Kerja.....	60
Tabel 4.5 Tanggapan Responden SPM.....	61
Tabel 4.6 Tanggapan Responden Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.....	62
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Manajemen.....	63
Table 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.....	64
Tabel 4.9 Hasil Uji Realibilats.....	65
Tabel 4.10 Analisis Regresi Sederhana.....	65
Tabel 4.11 Hasil Hipotesis Uji t.....	66
Tabel 4.12 Koefisiensi Determinasi.....	67

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.1 Kerangka Konsep	21
4.1 Bagan Struktur Organisasi BPKD.....	32



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan pemerintah (PP) No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (KKAP), menjelaskan bahwa suatu laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya apabila memenuhi karakteristik laporan keuangan, antara lain: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Apabila dalam suatu laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna maka laporan keuangan tersebut dapat membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi.

Agar relevansi dapat tercapai, maka. Laporan keuangan memenuhi karakteristik andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Menyajikan fakta secara jujur, serta dapat di verifikasi. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan melalui proses yang memberikan jaminan keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan agar penyajiannya berguna dalam pengambilan keputusan.

Pemerintah menetapkan peraturan (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang di terapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sistem akuntansi pemerintahan sebagai rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi

sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah.

Penyusunan laporan keuangan dan penyampaian kepada masyarakat merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangannya. Laporan keuangan berfungsi untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan undang-undang. (Fachrurozi, 2014).

Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah, masih banyak disajikan data yang tidak sesuai yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Untuk menegakkan akuntabilitas khususnya pada kinerja finansial di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Telah diketahui bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai (Mustafa dkk, 2010).

Demi terselenggaranya keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan yang baik, maka harus ada sumber daya manusia yang berkualitas, pemanfaatan teknologi yang baik dalam penggunaan sistem pelaporan keuangan. Kualitas Informasi dalam pembuatan laporan keuangan sangat

dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang bekerja dengan baik dalam penyusunan laporan keuangan. Sumber daya manusia adalah orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan organisasional. (Permatasari dkk ,2014).

Pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang ahli di bidangnya yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan memiliki pengalaman dalam bidang keuangan. Hal tersebut sangat diperlukan untuk menjalankan sistem-sistem yang berkaitan dengan sistem pengendalian yang ada pada pemerintahan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dibidangnya ini akan mampu memahami sistem-sistem yang berkaitan dengan akuntansi dengan baik. Setiap organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai. Salah satunya ialah menggunakan sistem yang dapat mengawasi dan mengendalikan segala aktivitas perusahaan agar berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Sistem tersebut ialah sistem pengendalian manajemen (SPM).

Setiap organisasi publik maupun swasta memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program atau aktivitas. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Dengan tercapainya sebuah tujuan, manajemen organisasi dapat mengukur bagaimana kinerjanya selama proses hingga tujuan itu dapat tercapai dan dapat menilai apakah manajemen itu sudah bekerja dengan baik. Dalam hal ini tujuan dari akuntansi Sektor publik tidak untuk mencari keuntungan melainkan pelayanan terhadap masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah sistem pengendalian manajemen berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kab. Enrekang?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kab.Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian tersebut, antara lain :

1. Manfaat teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori-teori dari sistem pengendalian manajemen terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2. Manfaat akademik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi untuk kemajuan sistem pelaporan keuangan pengaplikasian SPM serta diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Kebijakan Pemerintah.

Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi satuan kerja perangkat daerah untuk menetapkan langkah-langkah selanjutnya yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

a. Teori Kontinjensi

Teori Kontinjensi Akuntansi Manajemen menunjukkan adanya suatu upaya untuk menentukan suatu pengendalian yang memungkinkan untuk atau mengendalikan keadaan dalam suatu organisasi. Keberhasilan suatu model sistem akuntansi yang diciptakan sangat tergantung pada kondisi organisasi itu sendiri. Akhirnya, perkembangan dalam sistem akuntansi menyebabkan pula perkembangan pada sistem kontinjensi, sehingga suatu sistem pengendalian akan berbeda-beda di setiap organisasi.

b. Teori Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti mengikuti perintah, taat kepada perintah atau aturan dan disiplin. Teori kepatuhan di teliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya pada bidang psikologi dan sosiologi yang menekankan pada pentingnya sosialisasi dalam mempengaruhi kepatuhan individu maupun kelompok (Fachrurozi, 2014).

Kepatuhan entitas pelaporan dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangannya secara tepat waktu merupakan suatu hal yang mutlak dalam memenuhi keharusan pengungkapan informasi kepada masyarakat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Rosalin 2014).

B. Sistem Pengendalian Manajemen

Menurut Hary (2014) dalam bukunya yang berjudul Pengendalian Akuntansi dan Manajemen :

“Sistem adalah suatu kegiatan yang telah ditentukan caranya dan biasanya dilakukan berulang-ulang. Dalam konteks sistem pengendalian manajemen, Maka sistem adalah sekelompok komponen yang masing-masing saling menunjang saling berhubungan maupun tidak yang keseluruhannya merupakan sebuah kesatuan. Dapat dikatakan bahwa, sistem merupakan hal yang ritmis, berulang kali atau langkah-langkah terkoordinasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu”.

Menurut Hansen (1993) Pengendalian adalah proses penetapan standar, dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya, dan menganmbil tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Menejemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian pekerjaan pekerjaan anggota organisasi, serta pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi”.

Sistem pengendalian manajemen tidak hanya meliputi pengendalian perencanaan, monitoring aktivitas, pengukuran kinerja, dan mekanisme integratif yang sebagian besar berbasis akuntansi, tetapi juga berfungsi untuk memisahkan kontrol manajemen secara antifisial dari kontrol strategis dan kontrol operasional, dengan kata lain, sistem pengendalian manajemen dapat juga dijelaskan sebagai proses untuk mempengaruhi prilaku. Sistem pengendalian manajemen menyediakan sarana untuk menjadikan individu atau unit untuk dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama dalam sebuah organisasi.(Widarjo, 2018).

Sistem Pengendalian manajemen adalah suatu rangkaian tindakan aktifitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan secara terus-menerus. Pengendalian manajemen bukan hanya sebagai sistem saja dalam suatu organisasi, melainkan harus dianggap sebagai bagian penting dari setiap sistem yang dipakai manajemen untuk mengatur dan mengarahkan kegiatannya (Sumarsan 2013).

Sistem Pengendalian Manajemen merupakan suatu istilah yang luas yang meliputi sistem akuntansi manajemen dan juga termasuk pengendalian lainnya seperti pengendalian personal atau kelompok. Sistem Pengendalian Manajemen merupakan sesuatu yang sangat luas yang meliputi pengendalian yang didasarkan atas informasi akuntansi dari perencanaan, pemantauan aktifitas, pengukuran kinerja, dan Sumber daya manusia.

a. Elemen sistem Pengendalian manajemen.

Dalam sistem pengendalian terdapat empat elemen, diantaranya :

1. Sensor yaitu alat ini digunakan untuk mengukur apa yang sedang terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan.
2. Asesor yaitu alat yang digunakan untuk mengukur signifikansi dari apa yang sedang terjadi dengan melakukan perbandingan.
3. Efektor Yaitu alat yang digunakan untuk mengubah perilaku jika assessor menunjukkan kebutuhan untuk melakukannya.
4. Jaringan Komunikasi yaitu alat yang digunakan untuk meneruskan informasi dari ketiga alat tersebut sensor, assessor, dan Efektor.

Sistem pengendalian manajemen pemerintahan didukung oleh struktur Organisasi yang mengakomodasi sistem pengendalian, manajemen Sumber Daya Manusia, dan Lingkungan Pendukungnya.

b. Proses Sistem Pengendalian Manajemen

Proses pengendalian manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan tingkatan manajer untuk menjamin sekelompok orang dalam menjalankan strateginya. dimana berisi elemen yang ada dalam sistem pengendalian. Dalam suatu organisasi terdapat proses pengendalian manajemen terdiri atas sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Proses sistem pengendalian manajemen menurut Supriyono (2000) meliputi tahap-tahap:

1. Penyusunan program

Penyusunan program adalah proses pembuatan keputusan mengenai program-program utama yang akan dilaksanakan oleh organisasi untuk mengimplementasikan strategi-strategi dan penaksiran jumlah sumber sumber yang akan digunakan untuk setiap program. Penyusunan program merupakan bagian dari pengendalian manajemen yaitu perencanaan strategi dan pengendalian manajemen.

2. mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dengan beberapa bagian yang ada dalam perusahaan untuk kepentingan pencapaian tujuan perusahaan. Setelah koordinasi dilaksanakan kemudian mengkomunikasikan program tersebut kepada semua tingkatan manajemen yang ada dalam perusahaan.

3. Pengukuran kinerja

Penyusunan program dan anggaran yang telah ditetapkan dijadikan alat untuk menilai kinerja manajer dan memotivasi manajer dalam mengendalikan unit-unit pusat pertanggung jawaban. Dalam tahap ini anggaran dilaksanakan oleh manajer pusat pertanggung

jawaban dan akuntansi bertanggung jawab mencatat masukan yang sesungguhnya diperoleh oleh pusat pertanggung jawaban. Data yang dikelompokkan menurut program digunakan sebagai dasar pemrograman yang akan datang

4. Pelaporan dan analisis

Tahap terakhir dari proses pengendalian manajemen adalah pelaporan dan analisis. Laporan memuat informasi mengenai apa yang sesungguhnya terjadi dibandingkan dengan anggarannya atau programnya. Pelaporan adalah proses untuk menyusun dan menyajikan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan disusun untuk setiap pusat pertanggung jawaban dan program. Laporan pusat pertanggung jawaban menunjukkan informasi sesungguhnya yang harus disajikan secara tepat waktu.

c. Dasar-dasar Sistem Pengendalian Manajemen

Cita-cita pemerintah daerah adalah bahwa tak ada mata anggaran yang tidak direalisasi, Alokasi anggaran tepat waktu, efektif dan efisien laporan realisasi anggaran tercatat, dan laporan keuangan siap saji tepat waktu. Dasar umum pengendalian manajemen adalah tujuan pendirian sasaran tahunan, dan entitas pemerintah. Semua jenis organisasi Pemerintahan, pasti mempunyai maksud pembangunan sebuah organisasi. Hal tersebut memerlukan strategi dan aktivitas untuk mencapai tujuan membutuhkan pengendalian manajemen agar tujuan tercapai secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Sistem Pengendalian Manajemen Pemerintahan atau organisasi sektor publik terdiri atas beberapa indikator, Antara lain:

- a) Perencanaan.
- b) Komunikasi Informasi.
- c) Pengambilan keputusan.
- d) Sumber Daya Manusia.
- e) Pengendalian Intern.
- f) Penilaian Kinerja.
- g) Pelaporan .

Komunikasi Informasi merupakan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas Akuntansi. Perlu adanya optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (*Permata et al 2014*).

Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan baik dalam tingkat individu, Organisasi, atau Kelembagaan maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. (*Permata et al 2014*).

Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (*Permata et al 2014*).

d. Tipe Pengendalian Manajemen

Pengendalian Manajemen dapat dikategorikan dalam 3 kelompok, antara lain :

- a) *Preventive Control* (pengendalian preventif). Dalam pengendalian tersebut pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategik yang di jabarkan dalam bentuk pemrograman.
- b) *Operasional Control* (pengendalian operasional). Dalam pengendalian ini manajemen terkait dengan pelaksanaan pengawasan program yang telah ditetapkan berupa anggaran yang berhubungan dengan perencanaan dan pengendalian.
- c) Pengendalian Kinerja. Pengendalian kinerja berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur yang telah ditetapkan.

e. Karakteristik Sistem Pengendalian Manajemen

Pengendalian manajemen merupakan alat untuk mengimplementasikan strategi. Sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. Sistem pengendalian manajemen yang baik akan mempengaruhi perilaku sedemikian rupa sehingga memiliki tujuan yang selaras. Dengan demikian tujuan utama pengendalian manajemen adalah untuk menyelaraskan tujuan-tujuan itu, yang sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga tindakan-tindakan setiap anggota perusahaan atau organisasi untuk meraih kepentingannya sendiri bisa selaras dengan kepentingan suatu perusahaan.

f. Struktur Sistem Pengendalian Manajemen

Dalam sistem pengendalian manajemen didukung oleh sistem pengendalian yang baik, yaitu struktur yang terbentuk dalam pusat pertanggung jawaban (*Responsibility Centers*). Pusat pertanggung jawaban adalah organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dipimpinnya. Tujuannya di buat pusat pertanggung jawaban adalah :

- a) Sebagai basis perencanaan, pengendalian, penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya.
- b) Untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi.
- c) Memfasilitasi terbentuknya *goal congruance*.
- d) Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi tugas manajer pusat.
- e) Mendorong kreativitas bawahan.
- f) Alat untuk melaksanakan strategi Organisasi secara efektif dan efisien.
- g) Sebagai alat pengendali anggaran.

Struktur Sistem Pengendalian Manajemen, Antara Lain:

g. Tujuan Sistem Pengendalian Manajemen

Tujuan perancangan suatu sistem pengendalian manajemen, Antara lain :

- a) Diperolehnya keandalan dan integrasi informasi.
- b) Kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- c) Melindungi harta perusahaan.
- d) Pencapaian kegiatan ekonomis dan efisien.

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem pengendalian Manajemen didukung oleh Struktur Organisasi, Manajemen sumber daya manusia dan lingkungan pendukung. Pengendalian manajemen meliputi aktivitas perencanaan, sistem informasi komunikasi, motivasi, dan penilaian kinerja.

C. Ketepatan waktu pelaporan keuangan

Ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah tentang waktu penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit setelah tanggal tutup buku. Laporan keuangan yang terlambat dalam pelaporannya akan meningkatkan resiko, meningkatkan asimetri informasi dan mengurangi kemampuannya dalam memberikan gambaran mengenai peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan. ketepatan waktu dalam mengungkapkan laporan keuangan oleh manajemen (agent) kepada pemilik (principal) dilandasi oleh teori agensi (Rachmawaty dkk, 2008).

Teori Agensi yaitu memberikan kewenangan atau kekuasaan di sebut prinsipal dan yang menerima kewenangan di sebut agen. Hubungan keagenan dalam sektor pemerintahan ditunjukkan melalui hubungan rakyat sebagai prinsipal dengan pemerintah sebagai agen. Hubungan timbul karna adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa undang-undang untuk digunakan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya termasuk mengenai waktu pelaporan keuangan (Halim dan Abdullah : 2010).

D. Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pelaporan keuangan

Pelaporan keuangan adalah proses yang menggambarkan tentang laporan pertanggung jawaban manajemen kepada pemakai tentang pengelolaan keuangan yang di percaya kepadanya. Pemakai menggunakan laporan keuangan sebagai sebuah laporan pertanggung jawaban. yang harus dipahami dengan baik bagi para pemakai. (Mulya 2013).

Pelaporan Keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial Negara. Basis Akruai untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan equitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Aset dicatat sebesar pengeluaran dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban di catat sebesar jumlah kas dan setara kas yang di harapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

b. Nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah.

Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Informasi akan bermanfaat apabila informasi dapat dipahami dan digunakan oleh para pemakai serta

informasi juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut (Suwardjono,2005)

Berdasarkan GASB (1999) dalam Concepts Statemen informasi harus memiliki karakteristik dasar sebagai berikut :

1. Keterandalan.
2. Ketepatanwaktuan.
3. Ketaatan.
4. Dapat di pahami.

Dalam pernyataan Standar Akuntansi (PSAP) No 1 tentang penyajian laporan keuangan disebutkan bahwa laporan keuangan (*Financial Statement*) pemerintah terdiri dari dua jenis yaitu laporan pelaksanaan anggaran(*Budgetary reports*), dan laporan finansial (*Financial Report*). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Hal ini sesuai dengan karakteristik organisasi pemerintahan.

E. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah catatan infirmasi entitas pemerintah pada suatu periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan Keuangan Daerah merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik. Laporan keuangan didefenisikan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelporan. (Pradono, 2015)

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan bermanfaat untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam menyelenggarakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan menilai ketepatan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Muladi,2014).

Tujuan Laporan keuangan yaitu:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, Alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Menyediakan informasi tentang jumlah sumber daya yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah di capai.
- d. Menyediakan informasi yang berkaitan dengan bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya.
- e. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan yang berkaitan dengan sumber penerimanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, Penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis di antara lain, sebagai berikut:

Setyana, dkk (2015), Melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen terhadap kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ngawi ” metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif ,uji validitas, uji reliabilitas, Analisis regresi sederhana, koefisien, Hasil dari penelitian ini adalah pengaruh sistem kontrol manajemen berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pada PDAM Ngawi.

Sari dan Witono (2014), Melakukan Penelitian dengan judul ” Keterandalan dan Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah ditinjau dari sumber daya manusia, pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Survei, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap keterandalan maupun ketepatan waktuan pelaporan keuangan.

Junita, dkk (2018), Melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja perusahaan dengan strategi bisnis sebagai variabel intervening: Studi pada perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia” Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sensus sampling, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian manajemen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan melalui strategi sebagai pemediasi persial.

Sutoyo dan Mahardika (2015), Melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi(Studi kasus pada pemerintah daerah provinsi daerah istimewa jogjakarta” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa MCS berdasarakan sitem batas dan sistem interkatif tidak mempengaruhi kinerja organisasi, sedangkan sitem batas dan sistem diagnostik dilakukan.

Wiwik Andriani (2010), Melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan Teknologi nformasi terhadap keterandalan dan Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kapsitan sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

Saputra dan Eriani (2018), Melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompleksitas, kemandirian dan Opini Terhadap Ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kualitatif ,sensus, statitik deskriptif. Hasil daripenelitian ini adalah (1) kompleksitas, kemandirian

keuangan lokal, dan opini secara bersamaan mempengaruhi ketepatan waktu pemerintah daerah, (2) kompleksitas memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pemerintah daerah, (3) kemandirian keuangan lokal memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pemerintah daerah, dan (4) pendapat memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pemerintah daerah.

Nyoman (2015), Melakukan Penelitian dengan judul “ Pengaruh Manajemen Laba, Kualitas Auditor, dan Kesulitan Keuangan pada Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba, kualitas auditor, dan liquiditas sebagai proksi kesulitan keuangan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia 2010-2012. sedangkan leverage sebagai proksi kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan .

Indrastuti, dkk (2016), Melakukan Penelitian dengan judul “ Pengaruh kompetensi pejabat penata usahaan keuangan daerah sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah”. Hasil penelitian ini adalah H1 Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif antara kompetensi pejabat penata usahaan keuangan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, H2 menunjukkan terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

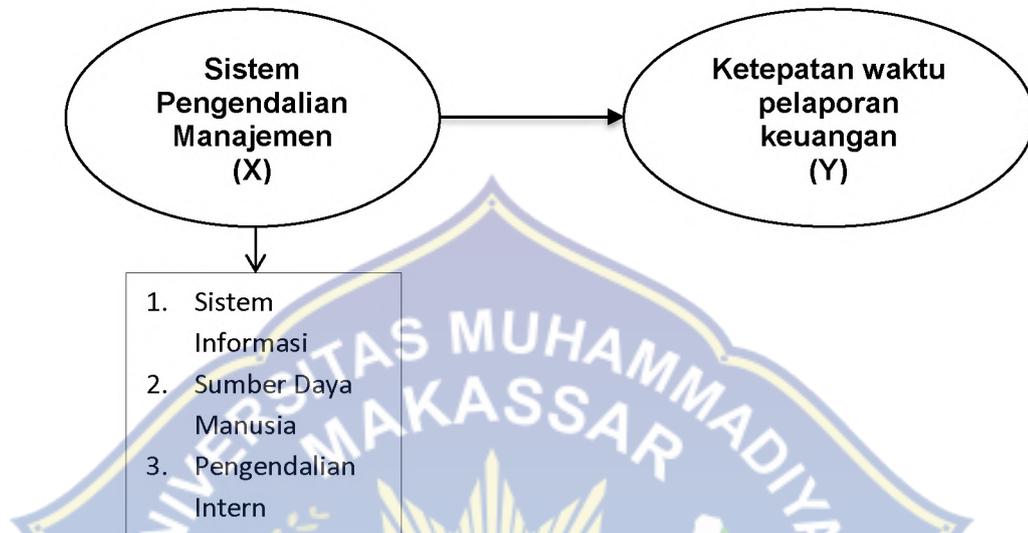
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	1. Sitti Wardani Bakri Katti. 2. Ellin Sella Tetyana (2015)	Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ngawi.	Dalam penelitian ini sistem pengendalian manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja pada PDAM Ngawi
2.	1. Sinta Permata Sari 2. Banu Witono (2014)	Keterandalan dan Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah ditinjau dari sumber daya manusia, pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi pada Pemerintah Daerah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap keterandalan maupun ketepatan waktuan pelaporan keuangan.
3.	1. Dewi Junita 2. Ria Nelly Sari 3. Pipin Kurnia (2018)	Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja perusahaan dengan strategi bisnis sebagai variabel intervaining: Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	Hasil dari penelitian ini sistem pengendalian manajemen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan melalui strategi sebagai pemediasi persial.
4.	1. Sutoyo 2. Desta Mahardika (2015)	Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi(Studi kasus pada pemerintah daerah provinsi daerah istimewa jogjakarta).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa MCS berdasarkan sitem batas dan sistem interkatif tidak mempengaruhi kinerja organisasi, sedangkan sitem batas dan sistem diagnostik dilakukan.
5.	Wiwi Andriani	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan)	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh signifikan berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan pada pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pealporan

			keuangan.
6.	1. Yuda Saputra 2. Nita Erika Eriani (2018)	Pengaruh Kompleksitas, kemandirian dan Opini Terhadap Ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.	(1) kompleksitas, kemandirian keuangan lokal, dan opini secara bersamaan mempengaruhi ketepatan waktu pemerintah daerah, (2) kompleksitas memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pemerintah daerah, (3) kemandirian keuangan lokal memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pemerintah daerah, dan (4) pendapat memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pemerintah daerah.
7.	Ni Nyoman Anggar Seni I Made Mertha (2015)	Pengaruh Manajemen Laba, Kualitas Auditor, dan Kesulitan Keuangan pada Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba, kualitas auditor, dan likuiditas sebagai proksi kesulitan keuangan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia 2010-2012. sedangkan leverage sebagai proksi kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan .
8.	1. Sri Indrastuti 2. Amris rusli tanjung 3. Desi Hariani (2016)	Pengaruh Kompetensi Pejabat Piñata Usahaan Keuangan. Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi pejabat penatausahaan keuangan dan pengawasan keuangan pemerintah daerah, dan terdapat pengaruh yang tidak signifikan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasinya.

G. Kerangka Konsep

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan maka peneliti membuat kerangka konsep sebagai berikut :



Gambar 2.1
kerangka Konsep

H. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah dipaparkan sebelumnya, maka Hipotesis pada penelitian ini adalah Diduga bahwa Sistem Pengendalian Manajemen Berpengaruh Terhadap Ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian explanatori dimana bertujuan untuk menganalisis pengaruh suatu variable dengan variable lainnya atau bagaimana suatu variable mempengaruhi variable lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, suatu proses yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.

Menurut Sugiyono (14:2015), metode penelitian Kuantitatif adalah metode yang berlandaskan terhadap filsafat positivisme, digunakan dalam meneliti terhadap sample dan pupulasi penelitian, tehnik pengambilan sample umumnya dilakukan dengan acak atau random sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara memanfaatkan instrumen penelitian yang dipakai, analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif/bisa diukur dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya.

B. Lokasi dan Tempat Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan di Pemerintah Daerah Kab. Enrekang. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan pada 10 juni-10 agustus 2019.

C. Defenisi Operasional dan Variabel Pengukuran

Untuk memudahkan dalam pengajuan hipotesis, maka penelitian menetapkan variabel sebagai berikut :

a. Variabel dependen

Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Y)

Ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah waktu penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit setelah ditutup. Ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan yang relative atas tanggal pelaporan yang diharapkan. Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi (Zainullah, 2017).

b. Variabel independen (X)

Variabel bebas dari penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu rangkaian tindakan aktifitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan terus-menerus dalam mengatur dan mengarahkan kegiatannya.

Tabel 3.1
Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Sumber Data
1.	Sistem Pengendalian Manajemen (X)	1. Komunikasi Informasi 2. Sumber Daya Manusia 3. Pengendalian intern	Ordinal	Primer
2.	Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Y)		Ordinal	Primer

Variabel-variabel tersebut akan diukur menggunakan skala ordinal. Menurut Sunyoto (2011) skala ordinal atau likert merupakan skala

yang mengukur tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap serangkaian pertanyaan yang mengukur suatu objek. Suatu pertanyaan dari variabel yang ada dalam kuesioner mengacu pada skala likert dimana masing-masing dibuat dengan menggunakan skala 1-5 kategori jawaban, yang masing-masing jawaban diberi *score* atau bobotnya yaitu banyaknya *score* antara 1-5 :

1. Jawaban **sangat tidak setuju** diberi *score* 1
2. Jawaban **tidak setuju** diberi *score* 2
3. Jawaban **ragu-ragu** diberi *score* 3
4. Jawaban **setuju** diberi *score* 4
5. Jawaban **sangat setuju** diberi *score* 5

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sigoyono 2017:17).

Berkaitan dengan itu, Maka populasi dalam penelitian ini adalah karyawan sebanyak 30 orang yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, Misalnya karna keterbatasan dana, tenaga

dan waktu, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono 2017:118).

Dilihat dari jumlah sampel hanya 30 Maka sampel dalam penelitian ini adalah 30 karyawan yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini yaitu :

1. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian dan disebarakan kepada setiap responden. Dalam Kuesioner tersebut terdapat jawaban-jawaban yang dapat mewakili keadaan yang sebenarnya. sehingga, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat diolah dan diuji untuk membuktikan relevansi hipotesis yang telah disusun.
2. Dokumentasi merupakan pengumpulan data dari catatan pelaporan keuangan pada kantor-kantor yang bersangkutan terhadap sesuatu yang ingin di teliti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara mengelola data yang terkumpul kemudian bisa memberika interpretasi. Hasil pengelolaan data ini digunakan untuk menunjukkan masalah yang telahdi rumuskan, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Uji validitas dan Uji Realibilitas

Uji Validitas menurut Umar (2011) digunakan untuk mengetahui skor masing-masing pertanyaan dengan skor total yang diperoleh dari

penjumlahan semua skor pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang/diganti karna tidak relevan.

Uji Realibilitas menurut Umar (2011) digunakan untuk menetapkan apakah instrumen dalam hal ini kuisisioner dapat digunakan satu kali, paling tidak oleh responden yang sama. Uji Realibilitas dalam penelitian ini menggunakan cronbach alpha (α), dimana suatu instrument dapat dinyatakan handal (Reliable) bila $\alpha > 0,60$.

2. Analisis Regresi Sederhana.

Penelitian membahas tentang pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan sehingga model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana yang hubungan secara linear antar satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y), Analisis ini untuk mengetahui adakah hubungan dan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

Persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut.

$$Y = a + \beta x + e$$

Keterangan :

Y = Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.

a = Konstanta.

β = Koefisien regresi.

X = Sistem Pengendalian Manajemen

e = error

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji Persial (Uji t)

Dalam penelitian akan menggunakan uji persial (uji t) untuk menguji Hipotesis untuk mengetahui perbandingan antar kedua variabel tersebut. Uji t dilakukan untuk membandingkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada tingkat signifikan 5%. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel bebas dapat menerangkan terikatnya. Artinya ada pengaruh antar variabel bebas dengan variabel terikat.

1. Jika r_{hitung} positif dan $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka butir pertanyaan tersebut valid pada signifikansi 0,05 (5%).
2. Jika r_{hitung} negatif dan $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.

b. Koefisien Determinasi

koefisien determinasi adalah antar nol atau Koefisien Determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan semua presentase semua pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Presentase menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan satu (1). Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti variabel independen menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, semakin besar koefisien determinasi maka akan semakin baik variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Enrekang yang merupakan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Cikal bakal keberadaan dari BPKD Kabupaten Enrekang yang sebelumnya menjadi Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang pada tahun 2004 adalah merupakan hasil penggabungan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Enrekang.

Pada tahun 2007 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Dengan berlaku peraturan tersebut maka dilakukan perubahan terhadap nomenklatur organisasi perangkat daerah di Kabupaten Enrekang termasuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). BPKD yang sudah ada ditambahkan tugas baru yaitu Badan Pengelolaan Asset Daerah yang sebelumnya adalah bagian perlengkapan pada sekretariat

daerah sehingga dibentuk organisasi perangkat daerah yang baru dan berubah nama menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau yang disingkat dengan DPKAD sebagaimana ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Enrekang.

Kemudian pada Tahun 2016 Pemerintah kembali menerbitkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dengan berlaku peraturan pemerintah tersebut maka dilakukan penataan dan peninjauan kembali terhadap organisasi perangkat daerah di Kabupaten Enrekang termasuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sehingga Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dipecah dan dimekarkan menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan bidang penerimaan DPKAD menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan bidang Asset dikembalikan menjadi Bagian Asset pada sekretariat daerah sebagaimana ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten Enrekang Nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

2. Visi dan Misi BPKD Kabupaten Enrekang

a. Visi:

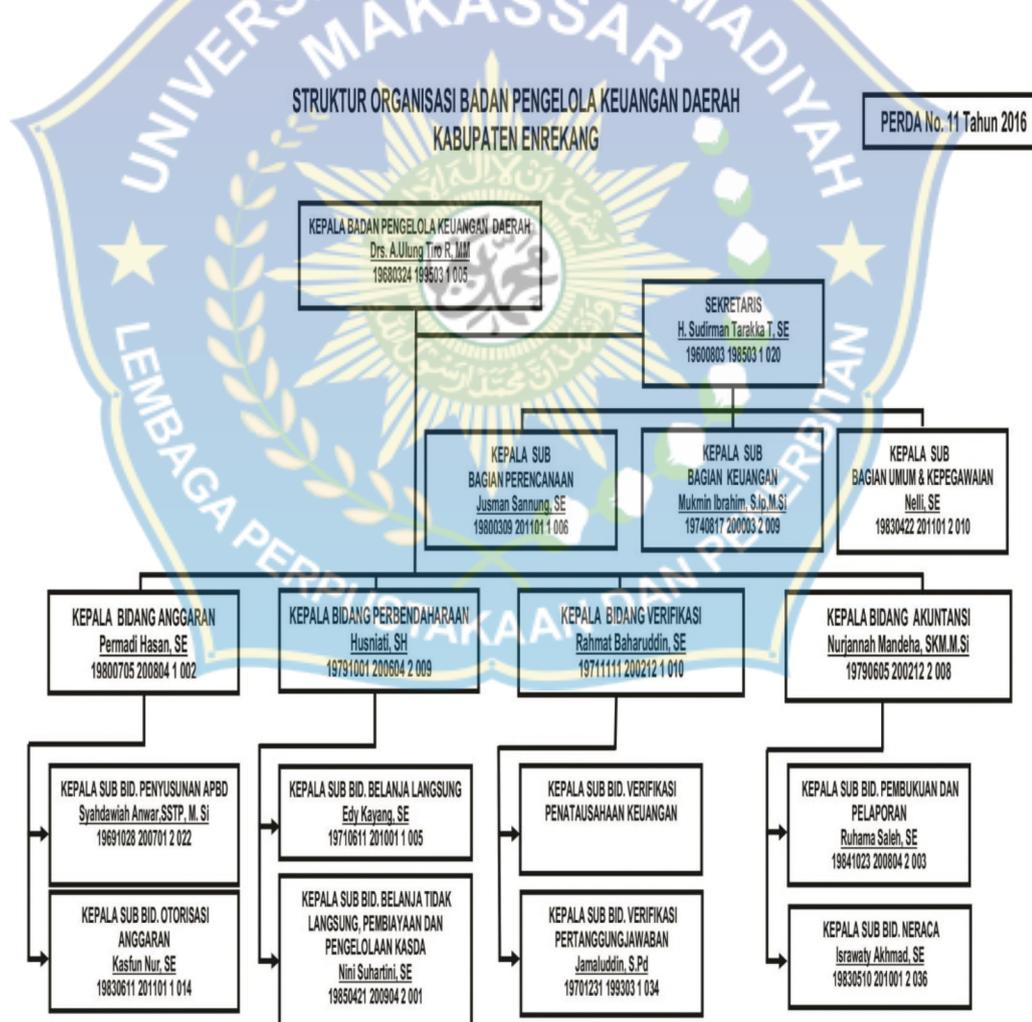
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparansi dan Akuntabilitas untuk gerakan membangun Enrekang maju dan sejahtera.

b. Misi:

- 1) Meningkatkan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan yang Berlaku.

- 2) Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur agar penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat berjalan secara Efektif, Efisien dan Akuntabilitas.
3. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi pada BPKD Kab. Enrekang
- a. Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan Bupati Enrekang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian dan Tata Kerja BPKD Kabupaten Enrekang, maka Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Enrekang sebagai berikut:



Gambar 4.1

Sumber : Data Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang

b. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Badan pengelolaan keuangan daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah yang mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi.

b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi;

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- 2) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan;
- 4) Penyusunan dan penyelenggaraan administrasi keuangan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah;
- 5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Memberikan petunjuk kepada sekretaris dan kepala bidang baik secara tertulis maupun lisan agar tugas-tugas dapat diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mengkoordinir kegiatan sekretaris dan kepala bidang lingkup badan pengelolaan keuangan daerah sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- 3) Menandatangani naskah dinas dalam bentuk nota dinas, konsep naskah dinas, surat tugas, surat perintah, perjalanan dinas, surat undangan, nota dinas, lebar disposisi dan daftar hadir serta surat-surat lainnya.
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris Daerah serta unsur terkait.
- 5) Melaksanakan konsultasi baik secara horizontal maupun dengan instansi yang lebih tinggi.

2. Sekretariat

a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan pertanggungjawaban kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi melaksanakan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga;
- 2) Menyelenggarakan kebijakan administrasi umum;
- 3) Pembinaan, pengkoordinasikan, pengendalian dan pengawasan program kegiatan sub bagian;
- 4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.

c. Sekretaris Mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Sekretariat;
- 2) Penyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat;
- 3) Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat dengan Kepala Badan serta para Kepala Bidang Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- 4) Membina dan mengkoordinasikan unit-unit kerja di Lingkup sekretariat;
- 5) Mendistribusikan Tugas Kepada Sub Bagian Linkup Sekretariat;

3. Sub Bagian Perencanaan

a. Sub bagian perencanaan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris dan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengendalian data, pembinaan evaluasi program/kegiatan badan pengelolaan keuangan daerah.

b. Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan kebijakan teknis sub bagian;
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
- 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; dan
- 4) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian.

c. Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan rancangan rencana strategis Sub Bagian Perencanaan;
- 2) Menyiapkan rancangan rencana anggaran satuan kerja Sub Bagian Perencanaan;
- 3) Mengkoordinasikan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana anggaran satuan kerja sub bagian serta dokumen penetapan kinerja bagian dengan sekretaris dinas, kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 4) Membina dan mengkoordinir tugas-tugas kerja dilingkup sub bagiannya;
- 5) Membantu sekretaris badan dalam pembinaan dan pengembangan pegawai dilingkup sub bagiannya;
- 6) Melaksanakan rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja sub bagian;

4. Sub Bagian Keuangan

a. Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan administrasi keuangan serta merumuskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) badan.

b. Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
- 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; dan
- 4) Pelaksanaan evaluasi program dalam kegiatan dalam lingkup sub bagian.

c. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan dan merumuskan rancangan rencana strategis sub bagian keuangan;
- 2) Menyiapkan dan merumuskan rencana kerja anggaran sub bagian keuangan;
- 3) Mengkoordinasikan rencana strategis dan rencana anggaran sub bagian keuangan dengan sekretaris badan, kepala sub bagian perencanaan dan kepala sub bagian umum dan kepegawaian;
- 4) Mengkoordinasikan tugas-tugas kerja di lingkup sub bagian;
- 5) Membantu sekretaris dalam pengelolaan urusan-urusan keuangan badan;

- 6) Membantu sekretaris dalam pembinaan dan pengembangan pegawai dilingkup sub bagian pengembangan pegawai dilingkup sub bagian keuangan;
- 7) Menerima dan memproses serta mendistribusikan surat dan dokumen keuangan bagian badan;
- 8) Melaksanakan rencana strategis dan rencana anggaran sub bagian keuangan;
- 9) Menghimpun dan memverifikasi terhadap dokumen pertanggungjawaban keuangan badan;
- 10) Melaksanakan telaahan staf kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam menyelenggarakan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
 - 2) Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
 - 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; dan
 - 4) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub.
- c. Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan dan merumuskan rancangan rencana strategis sub bagian umum dan kepegawaian;
- 2) Menyiapkan dan merumuskan rencan kerja anggaran sub bagian umum dan kepegawaian;
- 3) Mengkoordinasikan rencana strategis dan rencan kerja anggaran sub bagian dengan sekretaris dan kepala sub bagian perencanaan dan kepala sub bagian keuangan;
- 4) Mengkoordinasikan rugas-tugas kerja lingkungan sub bagaian;
- 5) Menyiapkan bahan koordiansi dalam melaksanakan rugas badan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur badan lingkup badan;
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi badan pengelola keuangan daerah;
- 7) Mengadakan pembinaan dan pengendalian terhadap sub bagaian;
- 8) Menghimpun, mengelolan, menggandakan, dan menyimpan dokumen secara rapi;
- 9) Membantu kepala badan dalam mengelola urusan-urusan administrasi barang inventarisasi dan kepegawiaian badan;

6. Bidang Anggaran

- a. Bidang anggaran dipimpin oleh seseorang kepala bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaimana tugas BPKD lingkup penyusunan anggaran dan petunjuk teknis dalam penyelenggraan penyusunan APBD, perubahan APBD, nota pengantar APBD, nota pengantar perubahan APBD dan Otorisasi anggaran.

b. Kepala bidang anggaran mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dibidang anggaran;
- 2) Pengaturan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dibidang anggaran;
- 3) Pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang anggaran;
- 4) Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang anggaran;
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan;

c. Kepala Bidang Anggaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang anggaran;
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup anggaran yang meliputi anggaran, belanja tidak langsung, dan belanja langsung dan pembiayaan;
- 3) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan ulang APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- 4) Pengkoordinasian rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD dan SKPKD;
- 5) Pengkoordinasian dan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD atas usulan SKPD;
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan asistensi rancangan APBD dan perubahan APBD, dan ranpergub penjabaran APBD dan perubahan APBD.

- 7) Penyiapan bahan anggaran kas pemerintah daerah;
- 8) Menyiapkan SPD sesuai DPA/DPPA SKPD;
- 9) Penyusunan laporan realisasi SPD SKPD;
- 10) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran;
- 11) Menyiapkan bahan pembiasaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Sub Bidang Penyusunan APBD

a. Sub bidang penyusunan APBD dipimpin oleh seorang kepala sub bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang perencanaan, pendaftaran dan pendataan dalam urusan perencanaan pendapatan daerah, pendaftaran dan pendataan pajak dan retribusi daerah;

b. Kepala sub bidang penyusunan APBD mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan penyusunan APBD;
- 2) Pengaturan penyelenggaraan urusan penyusunan APBD;
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan penyusunan APBD;
- 4) Pengawasan penyelenggaraan urusan penyusunan APBD;
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

c. Kepala sub bidang penyusunan APBD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang penyusunan APBD;

- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan RKA SKPD dan RKA SKPKD;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyusunan RAPBD dan perubahan APBD;
- 4) Pengkoordinasian RKA SKPD dan RKA SKPKD;
- 5) Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rancangan perda APBD dan perubahan APBD dan rancangan perbup penjabaran APBD dan perubahan APBD;
- 6) Pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan rancangan perda APBD dan perubahan APBD dan rancangan perbup penjabaran APBD dan perubahan APBD;
- 7) Penyiapan bahan dan koordinasi evaluasi dan asistensi rancangan perda APBD dan perubahan APBD;
- 8) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup penyusunan APBD;
- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Sub Bidang Otorisasi Anggaran

- a. Sub bidang otorisasi anggaran dipimpin oleh seorang kepala sub bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang anggaran. Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran lingkup otorisasi anggaran.

b. Kepala sub bidang otorisasi anggaran mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan otorisasi anggaran;
- 2) Pengaturan penyelenggaraan urusan otorisasi anggaran;
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan otorisasi anggaran;
- 4) Pengawasan penyelenggaraan urusan otorisasi anggaran;
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

c. Kepala sub bidang otorisasi anggaran mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang otorisasi anggaran;
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyusunan DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD;
- 4) Pengkoordinasian DPA dan DPPA SKPKD;
- 5) Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rancangan anggaran kas pemerintah daerah;
- 6) Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan DPA, DPPA dan anggaran kas pemerintah daerah;
- 7) Penyiapan bahan dan koordinasi penerbitan SPD sesuai DPA dan DPPA SKPD;
- 8) Penyiapan laporan realisasi SPD SKPD;

- 9) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup otorisasi anggaran;
- 10) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Bidang Pembendaharaan

- a. Bidang pembendaharaan dipimpin oleh seseorang kepala bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup pembebanan belanja langsung, belanja tidak langsung, pembiayaan dan pengelolal kas daerah;
- b. Kepala bidang pembendaharaan mempunyai fungsi;
 - 1) Perumusan kebijakan program kegiatan bidang pembendaharan;
 - 2) Perumusan kebijakan pengelolaan bidnag pembendaharaan;
 - 3) Melaksanakan kebijakan bidang pembendaharaan;
 - 4) Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang pembendaharaan;
 - 5) Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi mengenai bidang pembendaharaan;
 - 6) Melaksanakan fungsi kuasa bendahara umum daerah;
- c. Kepala bidang pembendaharaan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang pembendaharaan;

- 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup bidang pembendaharaan;
- 3) Melaksanakan fungsi kegiatan sebagai kuasa bendahara umum daerah;
- 4) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas dibidang belanja tidak langsung, belanja langsung, pembiayaan dan pengelolaan kas daerah;
- 5) Penyiapan SP2D belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan;
- 6) Pengujian terhadap pengajuan pembayaran belanja langsung, belanja tidak langsung, pembiayaan dan pengelolaan kas daerah;
- 7) Penyiapan surat pemerintah pembayaran (SPP) belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan;
- 8) Penyusunan laporan pengelolaan kas daerah secara periodik;
- 9) Pencatatan data penerimaan dan belanja kedalam bukuregister serta membuat laporan harian tentang penerimaan dan belanja daerah;
- 10) Pelaksanaan rekonsiliasi dengan bank per periode;
- 11) Penyusunan laporan realisasi SP2D SKPD;
- 12) Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan;
- 13) Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- 14) Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Sub Bidang Belanja Langsung:

a. Sub bidang belanja langsung dipimpin oleh seseorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perbendaharaan lingkup belanja langsung:

b. Kepala sub bidang belanja langsung mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan belanja langsung;
- 2) Peraturan penyelenggaraan urusan belanja langsung;
- 3) Pelaksanaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan belanja langsung;
- 4) Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan pimpinan.

c. Kepala sub bidang belanja langsung mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Penyiapan rencana program dan kegiatan sub bidang belanja langsung;
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang belanja langsung;
- 3) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di sub bidang belanja langsung;
- 4) Melakukan pemeriksaan dan pengujian kelengkapan berkas pengajuan surat perintah membayar (SPM) belanja langsung SKPD;
- 5) Penyiapan register penolakan surat perintah membayar (SPM) belanja langsung;
- 6) Memproses penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D)

belanja langsung;

7) Penyiapan bahan penyusunan

11. Sub bidang belanja tidak langsung, pembiayaan dan pengelola kas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mempunyai rencan, program dan kegiatan sub bidang belanja tidak langsung, pembiayaan dan pengelolaan kas.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang belanja tidak langsung, pembiayaan dan pengelolaan kas.
- c. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di sub bidang belanja tidak langsung, pembiayaan dan pengelolaan kas;
- d. Melakukan pemeriksaan dan pengujian kelengkapan berkas pengajuan surat perintah membayar belanja tidak langsung dan pembiayaan dari SKPD;
- e. Penyiapan register penolakan surat perintah membayar belanja tidak langsung dan pembiayaan;
- f. Memproses penerbitan surat perintah dana belanja tidak langsung dan pembiayaan;
- g. Penyiapan bahan pembuatan dan penyusunan daftar gaji SKPD;
- h. Penyiapan bahan untuk penerbitan surat keputusan pemberhentian pembayaran gaji;
- i. Penyusunan laporan realisasi SP2D belanja tidak langsung dan pembiayaan;
- j. Memproses pembayaran kepada bendahara pengeluaran atau pihak ke tiga berdasarkan SP2D di Bank Sulselbar;
- k. Mengkoordinasi kegiatan di administrasi yang berhubungan dengan

penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

- l. Membukukan atau mencatat bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- m. Menyusun laporan kinerja program bidang perbendaharaan lingkup belanja tidak langsung, pembiayaan dan pengelolaan kas;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Bidang Verifikasi

- a. Bidang Verifikasi dipimpin oleh seseorang kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok melaksanakan sebagian tugas lingkup BPKD di bidang verifikasi.
- b. Kepala Bidang verifikasi mempunyai fungsi:
 - 1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Bidang verifikasi;
 - 2) Pengaturan penyelenggaraan urusan bidang verifikasi;
 - 3) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Bidang Verifikasi;
 - 4) Pengawasan penyelenggaraan urusan Bidang verifikasi;
 - 5) Menyusun rancangan Sistem dan Prosedur penatausahaan Keuangan Daerah;
 - 6) Melaksanakan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPD;
 - 7) Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan daerah;
 - 8) Melaksanakan pembinaan kepada PPK dan Bendahara

Pengeluaran SKPD;

9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

c. Kepala bidang Verifikasi mempunyai ruiain tugas sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, anggaran, dan kegiatan bidang verifikasi;
- 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup bidang verifikasi;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang verifikasi;
- 4) Memverifikasi dan memeriksa kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP) belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan;
- 5) Pengujian terhadap surat perintah membayar (SPM) belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pembiayaan yang diajukan oleh SKPD;
- 6) Memverifikasi dan memeriksa kelengkapan surat pertanggungjawaban (SPJ) belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan;
- 7) Menyusun rancangan system dan prosedur penatausahaan keuangan daerah;
- 8) Melaksanakan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPD;
- 9) Melaksanakan pembianan penatausahaan keuangan daerah;
- 10) Pelaksanaan pembinaan terhadap pejabat penatausahaan keuangan (PPK) dan bendahara pengeluaran SKPD;
- 11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

13. Fungsi Sub Bidang Verifikasi Penatausahaan Keuangan

- a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang verifikasi penatausahaan keuangan;
- b. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang verifikasi penatausahaan keuangan;
- c. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di sub bidang verifikasi penatausahaan keuangan;
- d. Melakukan verifikasi kelengkapan berkas pengajuan surat perintah membayar dari SKPD;
- e. Melakukan verifikasi kelengkapan berkas pengajuan surat permintaan membayar dari SKPD;
- f. Melakukan verifikasi berita acara pembayaran pihak ketiga oleh SKPD
- g. Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan SKPD;
- h. Melaksanakan pembinaan kepada PPK dan bendahara pengeluaran SKPD
- i. Penyusunan laporan kinerja program bidang verifikasi lingkup penatausahaan keuangan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Bidang Akuntansi

- a. Bidang akuntansi dipimpin oleh seorang kepala bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup

akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban APBD.

b. Kepala bidang akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan akuntansi;
- 2) Pengaturan penyelenggaraan urusan akuntansi;
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan akuntansi;
- 4) Pengurusan penyelenggaraan urusan akuntansi;
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

c. Kepala Bidang Akuntansi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang akuntansi;
- 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup bidang akuntansi;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang akuntansi;
- 4) Pelaksanaan penyusunan, sosialisasi dan asistensi system penatausahaan akuntansi pemerintah daerah;
- 5) Pengkoordinasian laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan manajerial dari SKPD menjadi laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 6) Penyusunan laporan realisasi APBD setiap semester dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.

15. Fungsi kepala sub bidang pembukuan dan pelaporan:

- a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang pembukuan dan pelaporan;
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis dan perumusan kebijakan leingkup akuntansi;
- c. Pelaksanaan verifikasi atas SP2D yang telah terbit;

- d. Menghimpun proyeksi pendapatan dari seluruh SKPD dalam rangka pengelolaan anggaran kas;
- e. Pelaksanaan pembukuan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. Pengesahan surat pertanggungjawaban pendapatan;
- g. Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan lingkup akuntansi;
- h. Pelaksanaan moitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Fungsi Sub Bidang Neraca sebagai berikut:

- a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang neraca;
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup neraca;
- c. Penghimpun dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan daerah;
- d. Pelaksanaan konsolidasi dan rekonsiliasi pelaporan keuangan SKPD dengan keuangan SKPKD;
- e. Pelaporan penerimaan daerah secara terpadu pada semua unit pelaksanaan secara integritas;
- f. Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan semester dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
- g. Penyusunan laporan keuangan tahunan;
- h. Penyiapan rencana peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- i. Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan lingkup pelaporan;
- j. Pelaksanaan moitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas,
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.



B. Hasil Penelitian

1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturab Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2016 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, Sebagaimana yang telah diubah dengan Pengaturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017, dengan menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang:
 - a) Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

- d) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 4438);
- f) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- g) Peraturab Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5774);

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Akuntansi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- n) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Keuangan di Tingkat Bendahara;
- o) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- p) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 31);
- q) Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);

2. Deskriptif Data Penelitian dan Responden

Penelitian ini menguraikan mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diberikan langsung kepada responden dalam bentuk kuesioner. Jumlah kuesioner yang di sebar sebanyak 30 Kuesioner kepada pegawai yang terdapat pada kantor BPKD Kab.

Enrekang. Penyebaran Koesioner dilakukan oleh peneliti secara langsung pada kantor BPKD Kab. Enrekang. Adapun penyebaran Kuosioner tersebut dapat dilihat pada table sebagai berikut

a) Data Koesioner

Tabel 4.1
Jumlah Data Koesioner

No	Keterangan	Jumlah
1	Koesiner yang disebar	30
2	Koesiner yang tidak kembali	0
3	Koesioner yang kembali	30
4	Koesioner yang dapat diolah	30
5.	Tingkat Pengembalian (Response Rate)	100 %

Data sebelumnya dapat dilihat bahwa dari 30 kuesioner yang disebar yang dapat dikumpul sebanyak 30 buah kuesioner. Tingkat pengembalian yang diperoleh adalah sebesar 100% dari total kuesioner. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 0 kuesioner. Hal ini menunjukkan tingkat pengembalian kuesioner yang cukup tinggi karena peneliti mendatangi langsung kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang dalam melakukan penyebaran kuesioner.

b) Jenis Kelamin Responden

Tabel 4.2
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Absolut	Persentase
Laki-laki	12	40%
Perempuan	18	60%
Jumlah	30	100%

Sumber : Hasil Penelitian yang diolah, 2019

Pada table 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan jenis kelamin terbanyak adalah perempuan yaitu sebanyak 18 atau sebesar 60%, sedangkan laki-laki sebanyak 12 orang atau sebesar 40% dipenuhi oleh jenis kelamin laki-laki. Artinya sebagian besar Responden yang mengisi Koesioner adalah Perempuan.

c) Pendidikan Responden

Tabel 4.3
Pendidikan Responden

Pendidikan	Absolut	Persentase
SMA	3	10 %
S1	17	56.67%
S2	10	33.33%
Jumlah	30	100

Sumber : Hasil Penelitian yang diolah, 2019

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa jumlah responden yang terbanyak adalah dari kelompok responden berpendidikan sarjana strata

(S1) sebanyak 17 orang atau sebesar 56,67%. responden yang berpendidikan strata dua (S2) sebanyak 10 orang atau sebesar 33,33%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan responden maka semakin tinggi kemampuannya dan semakin tinggi kemungkinan keberhasilannya dalam menjalankan tugas-tugas pelaporan keuangan secara tepat waktu dan yang berpendidikan SMA sebesar 3 orang atau sebesar 10%,

d) Masa Kerja

Tabel 4.4
Masa Kerja

Lama Bekerja	Absolut	Persentase
1-5 Tahun	3	10 %
6-10 Tahun	22	73,33 %
10 Tahun	5	16,67 %
Jumlah	30	100

Sumber : Hasil penelitian yang diolah,2019

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan lama kerja selama 1-5 tahun adalah sebanyak 3 orang atau sebesar 10 %, yang bekerja selama 6-10 Tahun sebanyak 22orang atau sebesar 73,33%, dan yang bekerja selama 10 tahun sebanyak 16,67 atau sebesar 16,67%.

e) Tanggapan Responden tentang Sistem Pengendalian Manajemen

Variabel SPM pada penelitian kali ini diukur melalui 4 indikator yang didalamnya dibagi dalam 14 buah pertanyaan. Hasil tanggapan variabel SPM tersebut dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Mengenai SPM

Item	SS	S	R	TS	STS	Total %
X.1	20,0	76,7	3,3			100
X.2	20,0	46,7	30,0		3,3	100
X.3	3,3	70,0	23,3	3,3		100
X.4	23,3	60,0	13,3	3,3		100
X.5	3,3	80,0	6,7	10,0		100
X.6	13,3	60,0	16,7	10,0		100
X.7	10,0	60,0	16,7	6,7	6,7	100
X.8	33,3	40,0	20,0	3,3	3,3	100
X.9	33,3	56,7	10,0			100
X.10	16,7	76,7	6,7			100
X.11	16,7	76,7	6,7			100
X.12	16,7	66,7	16,7			100
X.13	26,7	70,0	3,3			100
X.14	6,7	83,3	10,0			100
Rata-rata	17,37	66,01	13,12	2,61	0,95	100

Sumber : Hasil Penelitian yang diolah, 2019

Berdasarkan table 4.5 diatas bahwa hasil analisis responden Sistem Pengendalian Manajemen(X) diperoleh nilai tertinggi dengan nilai rata-rata 66,01% dan nilai terendah sebesar 0,95%.

- f) Tanggapan Responden Tentang Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Tabel 4.6

Tanggapan Respdn Mengenai Ketepatan Waktu Pelaporan

Keuangan

Item	SS	S	R	TS	STS	Total %
Y.1	23,3	76,7				100
Y.2	20,0	76,7		3,3		100
Y.3	20,0	80,0				100
Y.4	26,7	66,7	6,7			100
Y.5	13,3	76,7	10,0			100
Y.6	26,7	70,0	3,3			100
Y.7	10,0	83,7	3,3	3,3		100
Rata-rata	20	75,78	3,32	0,94		100

Sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.6 diatas hasil analisis deskriptif ketepatan waktu pelaporan keuangan(Y) diperoleh nilai tertinggi sebesar 75,78% dan nilai terendah dengan Rata-rata 0,94%.

3. Teknik Analisis Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui skor masing-masing pertanyaan dengan skor total yang diperoleh dari penjumlahan semua skor pertanyaan-pertanyaan pada koesioner yang harus diganti karna tidak relevan. Umar (2011). Maksudnya untuk mengukur valid atau tidaknya suatu koesioner dilihat jika pertanyaan dalam koesioner

tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh koisioner tersebut.

Uji validitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel.

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Manajemen (X)

Pernyataan	Varibel	R hitung	R tabel	Keterangan
1	SPM	0,602	0,36	Valid
2	SPM	0,524	0,36	Valid
3	SPM	0,682	0,36	Valid
4	SPM	0,617	0,36	Valid
5	SPM	0,581	0,36	Valid
6	SPM	0,548	0,36	Valid
7	SPM	0,515	0,36	Valid
8	SPM	0,550	0,36	Valid
9	SPM	0,561	0,36	Valid
10	SPM	0,507	0,36	Valid
11	SPM	0,563	0,36	Valid
12	SPM	0,578	0,36	Valid
13	SPM	0,538	0,36	Valid
14	SPM	0,506	0,36	Valid

Sumber : Hasil olah data SPSS 24

Berdasarkan tabel 4.7 bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk dari setiap variabel menunjukkan hasil yang signifikan, dapat dilihat bahwa keseluruhan item variabel penelitian mempunyai r hitung $>$ r tabel yaitu pada taraf signifikan 5% ($\alpha =$

0,05) dan $n = 30$ ($N = 30-2$) diperoleh r tabel = 0,360 maka dapat diketahui hasil tiap-tiap item $> 0,360$ sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh item variabel penelitian adalah valid untuk digunakan sebagai instrument dalam penelitian atau pernyataan yang diajukan dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti pada Badan Pusat Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas Variabel Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Y)

Pernyataan	Variabel	R hitung	R tabel	Keterangan
1	KWPK	0,669	0,36	Valid
2	KWPK	0,627	0,36	Valid
3	KWPK	0,582	0,36	valid
4	KWPK	0,555	0,36	valid
5	KWPK	0,559	0,36	valid
6	KWPK	0,537	0,36	valid
7	KWPK	0,523	0,36	valid

Sumber : Hasil olah data SPSS 24

Berdasarkan tabel 4.8 tersebut menjelaskan bahwa variabel Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 dengan $n = 30$ (angka 30 karna jumlah responden adalah 30, maka R tabel sebesar 0,36. Hal ini berarti bahwa nilai pearson correlation lebih besar dari R tabel maka dalam suatu item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

b. Uji Realibilitas

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item Pernyataan	Cronbach Alpha
Sistem Pengendalian Manajemen (X)	14 item	0,811
Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Y)	7 item	0,660

Sumber : Hasil Data SPSS 24

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa instrumen untuk setiap variabel penelitian adalah reliabel, karna telah melewati batas koefisiensi Realibilitas (0,60) sehingga untuk melanjutkan ite-item pada masing-masing konsep Variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur .

c. Analisis Regresi Sederhana

Analisis Regresi Linear sederhana adalah hubungan secara linear antar satu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk arah hubungan variabel.

Tabel 4.10
Analisis Regresi Sederhana

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	15.440	3.165	
	X	.245	.057	.632

a. Dependent Variable: Y

Hasil dari table 4.10 perhitungan koefisien regresi sederhana tersebut mempengaruhi nilai koefisien konstanta adalah sebesar 15.440 koefisien variabel independen (X) adalah sebesar 0,245 sehingga di peroleh persamaan regresi $Y=15.440 + 0,245 X + 0$

Koefisien regresi sebesar 0,245 menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengaruh system pengendalian manajemen sebesar 1% maka akan diikuti oleh kenaikan SPM sebesar 24,5% dengan asumsi variabel independen lainnya tetap (konstan).

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.11

Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.440	3.165		4.879	.000
	X	.245	.057	.632	4.313	.000

a. Dependent Variable: Y

Dari table 4.11 diatas menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Manajemen berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu

Pelaporan Keuangan. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan yang di peroleh dari masing-masing variabel independen diatas 5% atau 0,05.

b. Koefisien Determinasi

Koefisiensi Determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar presentase pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen.

Tabel 4.12
Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.632 ^a	.399	.378	1.58422
a. Predictors: (Constant), X				
b. Dependent Variable: Y				

★ Nilai R yang merupakan simbol dari koefisien pada tabel 4.12 nilai korelasi adalah 0,632,. Menunjukkan bahwa derajat hubungan korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 63,2%. Artinya Sistem Pengendalian Manajemen mempunyai hubungan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan sebesar 63,2%.

Melalui tabel tersebut juga diperoleh R Square atau koefisien determinasi yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel independen dan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh adalah 0,399 artinya ketepatan waktu pelaporan keuangan sebesar 39,9%, dipengaruhi oleh sistem pengendalian manajemen. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa sistem pengendalian manajemen memiliki pengaruh sebesar 39,9% Terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka akan dilakukan pembahasan yang memberikan beberapa informasi secara rinci tentang hasil penelitian serta bagaimana pengaruh variabel terhadap variabel lainnya. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Sistem Pengendalian Manajemen (X), sedangkan variabel dependennya adalah Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Y). pengujian hipotesis antar variabel independen dan dependen dilakukan melalui hasil analisis SPSS 24. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan terhadap hipotesis sebagai berikut:

Berdasarkan output SPSS 24, hasil penelitian pada persamaan ini menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antara Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Karena nilai probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi ketepatan waktu laporan keuangan atau dapat dikatakan bahwa variabel sistem pengendalian manajemen berpengaruh signifikan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan dukungan pada hipotesis yang telah diajukan artinya, pengendalian manajemen yang meliputi Perencanaan, Monitoring Aktifitas, pemanfaatan teknologi informasi, Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Pemerintah Daerah saat ini harus menghadapi peraturan lanjutan dari PP No. 71/2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi

yang di terapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sistem akuntansi pemerintahan sebagai rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Katti dan Tetyana (2015) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan maupun organisasi. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian manajemen memang memegang peranan penting dalam menentukan kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini berarti bahwa semakin baik sistem pengendalian manajemen maka kinerja dalam suatu organisasi tentu akan meningkat pula. Kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan nilai koefisien tersebut apabila Kualitas SDM semakin baik maka kualitas laporan keuangan yang meliputi ketepatan waktu pelaporan akan meningkat. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Junaidi, dkk (2018).

Kemudian diikuti oleh penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Witono (2014) yang menunjukkan bahwa indikator dari Sistem Pengendalian Manajemen yang meliputi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, menunjukkan bahwa memiliki pengaruh terhadap Ketepatan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa Pelaporan keuangan Daerah yang memenuhi karakteristik ketepatwaktuan pelaporan keuangan membutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia, pengendalian internal, dan monitoring aktifitas atau pemanfaatan teknologi secara optimal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Penelitian ini terdapat pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, Dilihat dari hasil koefisien yang telah dibagikan kepada Responden bahwa Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan sebesar 39,9 % dengan nilai t bernilai +4.313 bertanda positif ada hubungan antar kedua variabel.
2. Sistem Pengendalian Manajemen dapat berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan begitu Pelaporan keuangan dapat dijalankan sesuai dengan pengendalian yang ditetapkan agar suatu sistem pengendalian dalam pemerintahan daerah berjalan dengan baik terkhusus pada badan pengelolaan keuangan daerah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan merumuskan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan untuk di jadikan masukan dan pertimbangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Bagi Pemerintahan

Disarankan untuk memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *timeliness* dalam memprediksi dan mengambil keputusan. Agar menjadi perhatian instansi pemerintahan agar bisa berkembang dan dengan hasil ini penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan untuk penugasan audit lebih awal.

2. Untuk DPRD

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan disarankan untuk lebih meningkatkan profesionalismenya terhadap karyawan untuk mentaati segala peraturan yang berkaitan dengan sistem pengendalian menejemen.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel-variabel yang lebih dalam yang terkait dengan penelitian ini, menambahkan referensi-referensi yang lebih luas dari penelitian ini, dan Perluasan objek penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Amries Rusli Tanjung, D. H. (2016). Pengaruh Kompetensi Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ekonomo KIAT* , 51-82.
- Dewi Junita, R. N. (2018). Pengaruh Sist Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Strategi Bisnis Sebagai Variabel. *Jurnal Akuntansi No.6 Vol 2* , 204-220.
- Febrian Cahyo Pradono, B. (2015). Kualitas Kuangan Pemerintah Daerah Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) . *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* , 188-200.
- Halim, A. (2010). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. UPP AMP YKPN
- Halim Abdul, A. T. (2003). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN..
- Herawati, T. (2014). pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *STAR-Study & Accaunting Research* , 1-14.
- Hery. (2014). *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Indonesia, P. P. (71 Tahun 2010). *Standar Akuntansi Pemerintah*. Fokusindo Mandiri.
- Marciariello. (1994). *Management Control System, Using Adaptive System to Attain Control*. New Jersey: Prentice Hall,Englowood Cliffs.
- Mulya, H. (2013). *Akuntansi Dasar*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ni Nyoman Anggar Seni, I. M. (2015). Pengaruh Manajemen Laba, Kualitas Auditor, dan Kesulitan Keuangan Pada Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. *Akuntansi Universitas Udayana* , 852-866.
- Rachmawati. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia . *Jurnal Umum Akuntansi Volume 9* , 143-160.
- Ratmono D, S. M. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Rosalin. (2011). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keandalan dan Time lines Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum*. Semarang: Fakultas Ekonomi Ponegoro.

Shinta Permata Sari, B. w. (2014). Keterandalan dan ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Daerah di Tinjau dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi . *Seminar Nasional dan Call for paper* , 418-425.

Siti Wardani Bakri Katti, E. S. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ngawi. *EKOMAXS VOLUME 4 No2* , 55-61.

Sugiyono, P. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.

Women, H. &. (1995). *Manajemen Accaunting*.



Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

Perihal : Permohonan Pengisian Koesioner

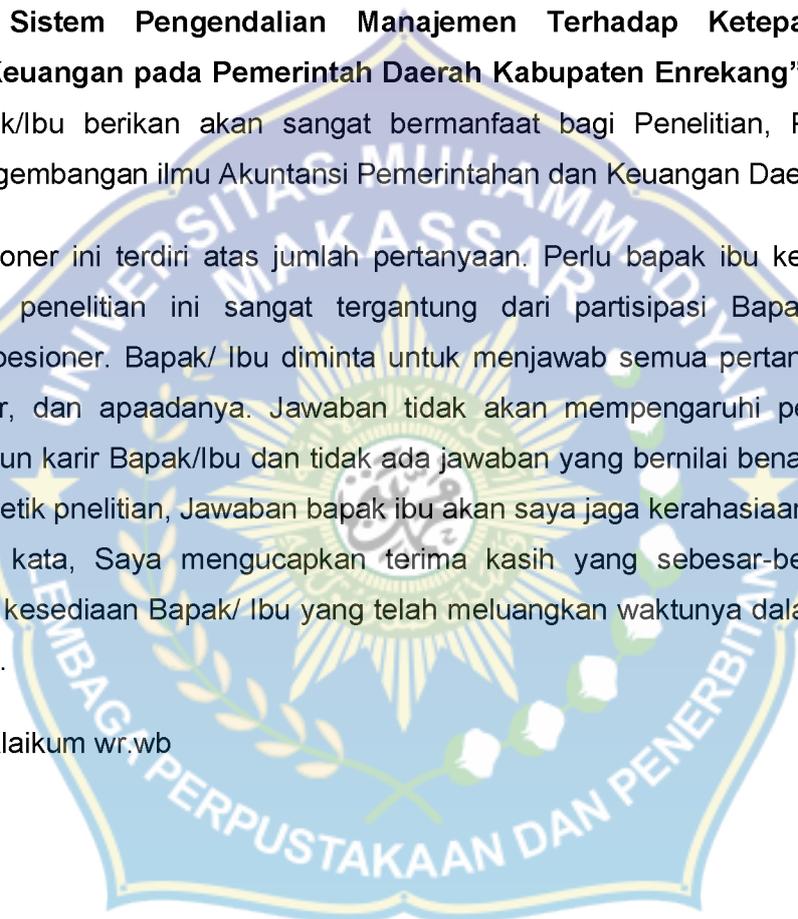
Yth. Bapak/ Ibu Responden Pegawai Bidang Keuangan Instansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Enrekang

Bersama ini saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner ini dalam rangka Penelitian saya yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang”**. Kontribusi yang Bapak/Ibu berikan akan sangat bermanfaat bagi Penelitian, Pemerintah, Maupun pengembangan ilmu Akuntansi Pemerintahan dan Keuangan Daerah.

Koesioner ini terdiri atas jumlah pertanyaan. Perlu bapak ibu ketahui bahwa keberhasilan penelitian ini sangat tergantung dari partisipasi Bapak/Ibu dalam menjawab koesioner. Bapak/ Ibu diminta untuk menjawab semua pertanyaan secara terbuka, jujur, dan apa adanya. Jawaban tidak akan mempengaruhi penilaian atas kinerja maupun karir Bapak/Ibu dan tidak ada jawaban yang bernilai benar atau salah, Sesuai kode etik penelitian, Jawaban bapak ibu akan saya jaga kerahasiaannya.

Akhir kata, Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kesediaan Bapak/ Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam pengisian Kuesioner ini.

Waasalamualaikum wr.wb



Kuisioner Penelitian

Identitas Responden

Nama Bapak/Ibu : _____

Jenis Kelamin : Pria Wanita

Usia : _____

Pendidikan Terakhir : _____

SMA Magister (S2)
 Diploma (D3) Lainnya....
 Sarjana (S1)

Lama Bekerja : _____

1-5 Tahun 6-10 Tahun > 10 Tahun

Isilah Kuisioner dibawah ini sesuai dengan keadaan ditempat Bapak/Ibu bekerja :

1. Sistem Pengendalian Manajemen

NO	PERNYATAAN	SS	S	R	TS	STS
1	Setiap transaksi dan aktivitas ditempat Bapak/Ibu bekerja telah didukung dengan otorisasi dari pihak yang berwenang				★	
2	Ditempat Bapak/Ibu bekerja telah menerapkan pemisahan tugas yang memadai					
3	Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi secara tepat waktu					
4	Dokumen perencanaan menjabarkan mengenai visi, misi, dan program kepala daerah yang ingin dicapai.					
5	Dengan adanya sinkronisasi program dan kegiatan pada pemerintah daerah dengan kinerja pemerintahan telah sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.					
6	Adanya evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara tepat waktu					
7	Terdapat evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas telah sesuai dengan target yang ditetapkan.					

8	Dalam waktu yang tidak ditentukan pimpinan menindak lanjuti setiap hasil temuan maupun saran yang diberikan melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi dan menunjukkan adanya kelemahan yang perlu perbaikan.					
9	Ditempat Bapak/Ibu bekerja berdasarkan pedoman mengenai proses akuntansi yang telah ada					
10	Materi pelatihan yang Bapak/Ibu ikuti diberikan sesuai dengan kebutuhan sebagai fungsi pengelola keuangan					
11	Dalam instansi tempat Bapak/Ibu bekerja menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010					
12	Informasi Telah di Sediakan tepat waktu dan seluruh komunikasi telah dilaksanakan secara efektif					
13	Ditempat Bapak/Ibu bekerja melaksanakan sistem akuntansi memungkinkan audit					
14	Penggunaan anggaran/pemegang kas pada pemerintah daerah telah menyampaikan surat pertanggung jawaban tepat pada waktunya					

2. Ketepatan waktu pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

NO	PERTANYAAN	SS	S	R	TS	STS
1	Laporan Keuangan atas perencanaan yang dibuat dihasilkan oleh instansi tempat saya bekerja memberikan informasi Laporan keuangan secara tepat waktu					
2	Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja menyelesaikan laporan keuangan dan menyampikan pelaporan keuangan tepat waktu					
3	Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja menyajikan laporan keuangan secara jujur dan tepat waktu					
4	Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja dalam melaksanakan perencanaan menyajikan informasi yang di arahkan untuk kebutuhan umum secara tepat waktu					
5	Ditempat Bapak/Ibu bekerja memberikan informasi keuangan yang dihasilkan dapat di uji secara tepat waktu					
6	Apakah Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi tempa Bapak/Ibu bekerja dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya					

7	Informasi pelaporan keuangan telah di Sediakan tepat waktu dan seluruh komunikasi telah dilaksanakan secara efektif.					
---	--	--	--	--	--	--



Lampiran 3

Karakteristik Jawaban Responden (X)

X.1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	R	1	3.3	3.3	3.3
	S	23	76.7	76.7	80.0
	SS	6	20.0	20.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X.2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	3.3	3.3	3.3
	R	9	30.0	30.0	33.3
	S	14	46.7	46.7	80.0
	SS	6	20.0	20.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X.3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	3.3	3.3	3.3
	R	7	23.3	23.3	26.7
	S	21	70.0	70.0	96.7
	SS	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X.4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	3.3	3.3	3.3
	R	4	13.3	13.3	16.7
	S	18	60.0	60.0	76.7
	SS	7	23.3	23.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X.5					
		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	10.0	10.0	10.0
	R	2	6.7	6.7	16.7
	S	24	80.0	80.0	96.7
	SS	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X.6					
		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	10.0	10.0	10.0
	R	5	16.7	16.7	26.7
	S	18	60.0	60.0	86.7
	SS	4	13.3	13.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X.7					
		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	6.7	6.7	6.7
	TS	2	6.7	6.7	13.3
	R	5	16.7	16.7	30.0
	S	18	60.0	60.0	90.0
	SS	3	10.0	10.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X.8					
		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	3.3	3.3	3.3
	TS	1	3.3	3.3	6.7
	R	6	20.0	20.0	26.7
	S	12	40.0	40.0	66.7
	SS	10	33.3	33.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X.9					
		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	R	3	10.0	10.0	10.0
	S	17	56.7	56.7	66.7
	SS	10	33.3	33.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

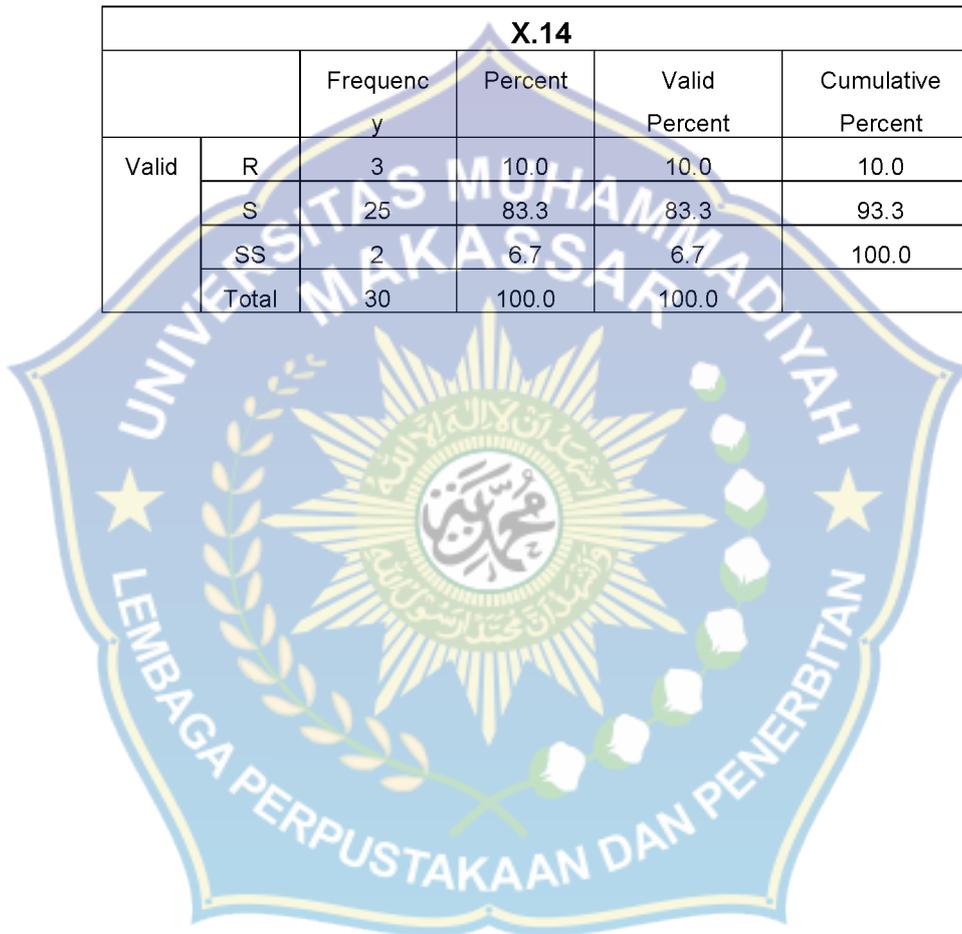
X.10					
		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	R	2	6.7	6.7	6.7
	S	23	76.7	76.7	83.3
	SS	5	16.7	16.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X.11					
		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	R	2	6.7	6.7	6.7
	S	23	76.7	76.7	83.3
	SS	5	16.7	16.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X.12					
		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	R	5	16.7	16.7	16.7
	S	20	66.7	66.7	83.3
	SS	5	16.7	16.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X.13					
		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	R	1	3.3	3.3	3.3
	S	21	70.0	70.0	73.3
	SS	8	26.7	26.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X.14					
		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	R	3	10.0	10.0	10.0
	S	25	83.3	83.3	93.3
	SS	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	



Karakteristik Jawaban Responden (Y)

Y.1					
		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	23	76.7	76.7	76.7
	SS	7	23.3	23.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y.2					
		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	3.3	3.3	3.3
	S	23	76.7	76.7	80.0
	SS	6	20.0	20.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y.3					
		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	24	80.0	80.0	80.0
	SS	6	20.0	20.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y.4					
		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	R	2	6.7	6.7	6.7
	S	20	66.7	66.7	73.3
	SS	8	26.7	26.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y.5					
		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	R	3	10.0	10.0	10.0
	S	23	76.7	76.7	86.7
	SS	4	13.3	13.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y.6					
		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	R	1	3.3	3.3	3.3
	S	21	70.0	70.0	73.3
	SS	8	26.7	26.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y.7					
		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	3.3	3.3	3.3
	R	1	3.3	3.3	6.7
	S	25	83.3	83.3	90.0
	SS	3	10.0	10.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Tabel 4.1 :Jumlah Data Koesioner

No	Keterangan	Jumlah
1	Koesiner yang disebarkan	30
2	Koesiner yang tidak kembali	0
3	Koesioner yang kembali	30
4	Koesioner yang dapat diolah	30
5.	Tingkat Pengembalian (Response Rate)	100 %

Sumber : Hasil Penelitian yang diolah,2019

Tabel 4.2 :Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Absolut	Persentase
Laki-laki	12	40%
Perempuan	18	60%
Jumlah	30	100%

Sumber : Hasil Penelitian yang diolah,2019

Tabel 4.3 : Pendidikan Responden

Pendidikan	Absolut	Persentase
SMA	3	10 %
S1	17	56.67%
S2	10	33.33%
Jumlah	30	100

Sumber : Hasil Penelitian yang diolah, 2019

Tabel 4.4 : Masa Kerja

Lama Bekerja	Absolut	Persentase
1-5 Tahun	3	10 %
6-10 Tahun	22	73,33 %
10 Tahun	5	16.67 %
Jumlah	30	100

Sumber : Hasil penelitian yang diolah,2019

Tabel 4.5 :Tanggapan Responden Mengenai SPM

Item	SS	S	R	TS	STS	Total %
X.1	20,0	76,7	3,3			100
X.2	20,0	46,7	30,0		3,3	100
X.3	3,3	70,0	23,3	3,3		100
X.4	23,3	60,0	13,3	3,3		100
X.5	3,3	80,0	6,7	10,0		100
X.6	13,3	60,0	16,7	10,0		100
X.7	10,0	60,0	16,7	6,7	6,7	100
X.8	33,3	40,0	20,0	3,3	3,3	100
X.9	33,3	56,7	10,0			100
X.10	16,7	76,7	6,7			100
X.11	16,7	76,7	6,7			100
X.12	16,7	66,7	16,7			100
X.13	26,7	70,0	3,3			100
X.14	6,7	83,3	10,0			100
Rata-rata	17,37	66,01	13,12	2,61	0,95	100

Sumber : Hasil Penelitian yang diolah, 2019

Tabel 4.6 :Tanggapan Respdnen Mengenai Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Item	SS	S	R	TS	STS	Total %
Y.1	23,3	76,7				100
Y.2	20,0	76,7		3,3		100
Y.3	20,0	80,0				100
Y.4	26,7	66,7	6,7			100
Y.5	13,3	76,7	10,0			100
Y.6	26,7	70,0	3,3			100
Y.7	10,0	83,7	3,3	3,3		100
Rata-rata	20	75,78	3,32	0,94		100

Sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2019

Tabel 4.7 : Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Manajemen (X)

Pernyataan	Varibel	R hitung	R tabel	Keterangan
1	SPM	0,602	0,36	Valid
2	SPM	0,524	0,36	Valid
3	SPM	0,682	0,36	Valid
4	SPM	0,617	0,36	Valid
5	SPM	0,581	0,36	Valid
6	SPM	0,548	0,36	Valid
7	SPM	0,515	0,36	Valid
8	SPM	0,550	0,36	Valid
9	SPM	0,561	0,36	Valid
10	SPM	0,507	0,36	Valid
11	SPM	0,563	0,36	Valid
12	SPM	0,578	0,36	Valid
13	SPM	0,538	0,36	Valid
14	SPM	0,506	0,36	Valid

Sumber : Hasil olah data SPSS 24

Tabel 4.8 : Hasil Uji Validitas Variabel Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Y)

Pernyataan	Variabel	R hitung	R tabel	Keterangan
1	KWPK	0,669	0,36	Valid
2	KWPK	0,627	0,36	Valid
3	KWPK	0,582	0,36	valid
4	KWPK	0,555	0,36	valid
5	KWPK	0,559	0,36	valid
6	KWPK	0,537	0,36	valid
7	KWPK	0,523	0,36	valid

Sumber : Hasil olah data SPSS 24

Tabel 4.9 : Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item Pernyataan	Cronbach Alpha
Sistem Pengendalian Manajemen (X)	14 item	0,811
Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Y)	7 item	0,660

Sumber : Hasil Data SPSS 24



Lampiran 4

Uji Validitas dan Realibilitas

Correlations

		X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X.8	X.9	X.10	X.11	X.12	X.13	X.14	X.SU M
X.1	Pearson Correlation	1	.506**	.427*	.191	.459*	.381*	.298	.237	.100	.078	.233	.509**	.272	.030	.602**
	Sig. (2-tailed)		.004	.019	.312	.011	.038	.110	.207	.601	.683	.215	.004	.146	.874	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X.2	Pearson Correlation	.506**	1	.360	.227	.321	.362*	.140	.148	.025	.210	.049	.265	.185	.075	.524**
	Sig. (2-tailed)	.004		.051	.227	.084	.050	.462	.436	.896	.265	.799	.157	.327	.693	.003
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X.3	Pearson Correlation	.427*	.360	1	.516**	.447*	.299	.165	.043	.365*	.344	.467**	.705**	.336	.248	.682**
	Sig. (2-tailed)	.019	.051		.004	.013	.108	.384	.820	.047	.062	.009	.000	.069	.187	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X.4	Pearson Correlation	.191	.227	.516**	1	.441*	.190	.115	.242	.595**	.290	.389*	.245	.359	.120	.617**
	Sig. (2-tailed)	.312	.227	.004		.015	.315	.546	.198	.001	.121	.033	.192	.052	.528	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X.5	Pearson Correlation	.459*	.321	.447*	.441*	1	.209	.162	.141	.295	.180	.285	.346	.265	.094	.581**
	Sig. (2-tailed)	.011	.084	.013	.015		.267	.392	.459	.114	.342	.126	.061	.156	.621	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X.6	Pearson	.381*	.362*	.299	.190	.209	1	.219	.201	.245	.149	.237	.216	.137	.282	.548**

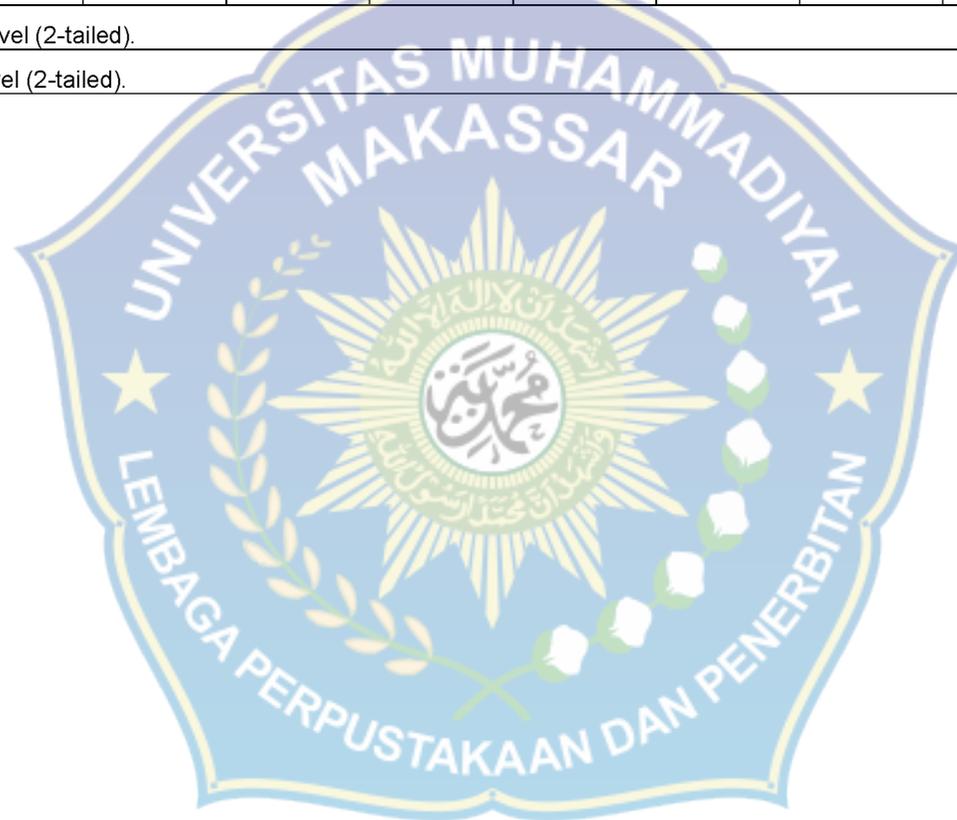
	Correlation															
	Sig. (2-tailed)	.038	.050	.108	.315	.267		.246	.286	.192	.431	.207	.253	.471	.131	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X.7	Pearson Correlation	.298	.140	.165	.115	.162	.219	1	.433*	-.066	.086	.086	.293	.259	.382*	.515**
	Sig. (2-tailed)	.110	.462	.384	.546	.392	.246		.017	.729	.652	.652	.117	.167	.037	.004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X.8	Pearson Correlation	.237	.148	.043	.242	.141	.201	.433*	1	.344	.294	.366*	.000	.016	.414*	.550**
	Sig. (2-tailed)	.207	.436	.820	.198	.459	.286	.017		.063	.114	.047	1.000	.933	.023	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X.9	Pearson Correlation	.100	.025	.365*	.595**	.295	.245	-.066	.344	1	.607**	.493**	.094	.368*	.297	.561**
	Sig. (2-tailed)	.601	.896	.047	.001	.114	.192	.729	.063		.000	.006	.622	.045	.111	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X.10	Pearson Correlation	.078	.210	.344	.290	.180	.149	.086	.294	.607**	1	.403*	.122	.185	.364*	.507**
	Sig. (2-tailed)	.683	.265	.062	.121	.342	.431	.652	.114	.000		.027	.520	.328	.048	.004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X.11	Pearson Correlation	.233	.049	.467**	.389*	.285	.237	.086	.366*	.493**	.403*	1	.244	.327	.191	.563**
	Sig. (2-tailed)	.215	.799	.009	.033	.126	.207	.652	.047	.006	.027		.193	.077	.313	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X.1	Pearson	.509**	.265	.705**	.245	.346	.216	.293	.000	.094	.122	.244	1	.583**	.284	.578**

2	Correlation															
	Sig. (2-tailed)	.004	.157	.000	.192	.061	.253	.117	1.000	.622	.520	.193		.001	.129	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X.1 3	Pearson Correlation	.272	.185	.336	.359	.265	.137	.259	.016	.368*	.185	.327	.583**	1	.369*	.538**
	Sig. (2-tailed)	.146	.327	.069	.052	.156	.471	.167	.933	.045	.328	.077	.001		.045	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X.1 4	Pearson Correlation	.030	.075	.248	.120	.094	.282	.382*	.414*	.297	.364*	.191	.284	.369*	1	.506**
	Sig. (2-tailed)	.874	.693	.187	.528	.621	.131	.037	.023	.111	.048	.313	.129	.045		.004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X.S UM	Pearson Correlation	.602**	.524**	.682**	.617**	.581**	.548**	.515**	.550**	.561**	.507**	.563**	.578**	.538**	.506**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000	.000	.001	.002	.004	.002	.001	.004	.001	.001	.002	.004	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).																
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).																

Y.SU	Pearson Correlation	.669**	.627**	.582**	.555**	.559**	.537**	.523**	1
M	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.001	.001	.002	.003	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



BIOGRAFI PENULIS



RESKY ARSITA, lahir di Kolai pada tanggal 16 Oktober 1997 anak kedua dari empat bersaudara. Ayah Sulnadi dan Ibu Inriani. Mengenal dunia pendidikan pada tahun 2003, dan melanjutkan pendidikan di SDN 38 Kolai tamat tahun (2009), SMPN 1 Baraka (2009-2010) dan tamat tahun (2012), MAN 1 Baraka (2012-2014) dan tamat tahun (2015), dan menjadi mahasiswa Strata 1 (S1) pada Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar sejak 2015 sampai sekarang.

